

PENTINGNYA AKSELERASI PENURUNAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

21

Mohammad Teja*

Abstrak

Hampir 20 tahun program bantuan sosial telah dilaksanakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Namun angka kemiskinan masih jauh dari target nol persen pada tahun 2024. Per Maret 2023, angka kemiskinan mencapai 9,36%. Oleh karenanya, negara harus kembali mencari alternatif program yang mampu membangun kemandirian masyarakat tanpa bergantung pada bantuan sosial. Tulisan ini mendeskripsikan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kehidupan ekonomi berbasis kearifan lokal. Tidak mudah melepaskan bantuan sosial dari masyarakat. Untuk mengalihkan bantuan tersebut, dapat dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan usaha bersama yang dibangun untuk menjadi program pemberdayaan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh hasil survei Populi Center yang menyatakan sekitar 1,8% dari 1.200 responden yang disurvei, memilih pemberdayaan masyarakat menjadi program yang harus diteruskan tiap pergantian pemerintahan. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah dapat merancang pilot project pemberdayaan masyarakat. Komisi VIII DPR RI juga perlu mengawasi dan mendukung anggaran untuk mencapai target tersebut.

Pendahuluan

Program bantuan sosial berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah hampir 20 tahun dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan. Selama ini bantuan sosial selalu menjadi program rutin di setiap

rezim pemerintahan. Hasil survei Populi Center pada pertengahan tahun 2023 yang melibatkan 1.200 orang menunjukkan bahwa program bantuan sosial merupakan program yang paling penting untuk diteruskan (lihat Tabel 1).



* Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI, email: teja@dpr.go.id.



Tabel 1. Program yang Paling Penting Diteruskan oleh Presiden

Program	Persentase
Program Bantuan Sosial	33,6%
Program Pembangunan Infrastruktur	19,6%
Program Pemerataan Pembangunan	4,0%,
Program Pembangunan Ibu Kota Negara	3,7%,
Program Pembangunan Ekonomi	3,1%,
Program Dana Desa	2,6%,
Program Pembukaan Lapangan Pekerjaan	2,0%.
Program Pemberdayaan Masyarakat	1,8%.
Program Keluarga Harapan (PKH)	1,4%

Sumber: Hasil survei Populi Center, kompas.com., 26 Juni 2023.

Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat agar tidak masuk ke dalam risiko-risiko sosial dan kemiskinan akut serta agar dapat menjalankan fungsi sosial dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, sering kali bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang saku dan kebutuhan lainnya yang bukan kebutuhan pokok. Selain itu, banyak penerima bantuan yang tidak mengembangkan usaha yang telah ada (Kompas, 3 Agustus 2023). Selama ini, program bantuan sosial terhadap masyarakat miskin menjadi kendala dalam membangun semangat pemberdayaan masyarakat.

Per Maret 2023, angka kemiskinan sebesar 9,36%. Angka tersebut masih jauh dari target pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 (bps.go.id, 17 Juli 2023). Oleh karenanya, negara harus mencari alternatif program yang mampu membangun kemandirian masyarakat tanpa bergantung pada bantuan sosial. Tulisan ini mendeskripsikan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kehidupan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Pemberdayaan Masyarakat

Selama ini, lebih kurang Rp400 triliun APBN digunakan untuk pengentasan kemiskinan tiap tahunnya (Kompas, 3 Agustus 2023). Oleh karena besarnya anggaran tersebut, maka ke depan, orientasi pemberian bantuan sosial seperti sembako, uang tunai, dan bantuan lainnya hanya diberikan pada masyarakat yang benar-benar memiliki risiko menghadapi kerentanan sosial dan bukan untuk mengentaskan kemiskinan (kompas.id., 22 Mei 2023).

Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial harus segera diubah untuk menjadi mandiri. Kegiatan pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat merupakan pilihan alternatif terbaik untuk membantu akselerasi masyarakat keluar dari permasalahan kemiskinan. Ke depan, pemilihan program menjadi penting dalam usaha membuat masyarakat penerima bantuan sosial menjadi warga yang mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial. Kemandirian juga diperlukan bagi penerima bantuan PKH maupun BLT yang sudah tidak mendapat bantuan lagi karena sudah lulus sekolah menengah atas.

Secara bertahap pemberdayaan masyarakat perlu menjadi program

penting untuk mengalihkan program bantuan sosial. Masyarakat penerima bantuan sosial dapat menaikkan manfaat bantuan sosial pada program pemberdayaan yang kompetitif. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia. Program pemberdayaan masyarakat merupakan program yang paling dimungkinkan untuk mengubah keadaan miskin masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan membangun masyarakat terkait erat dengan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat bertujuan memerangi kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif serta penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Menurut Hidayanti (2008), pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahapan. *Pertama*, seleksi lokasi sesuai dengan kriteria yang disepakati lembaga, pihak terkait, dan masyarakat. *Kedua*, sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan komunikasi dengan masyarakat. *Ketiga*, proses kajian keadaan wilayah, rencana kegiatan kelompok, pengembangan kelompok, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi partisipatif. *Keempat*, pemandirian masyarakat dengan secara perlahan mengurangi peran lembaga dan pihak terkait.

Program pemberdayaan masyarakat mempercepat masyarakat Indonesia yang mandiri dan maju berdasarkan keunggulan kompetitif serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini perlu didukung

ketersediaan kearifan lokal yang mampu dikelolakembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis pada kearifan harus mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah cukup lama digunakan dalam kegiatan dan program meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan strategi adaptasi yang memang muncul dari dalam masyarakat dalam membenahi masalah-masalah sosial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal merupakan hasil interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya sehingga membantu masyarakat mandiri. Kearifan lokal menjadi inti dari usaha mengentaskan kemiskinan yang ada dan tumbuh di masyarakat sebagai sasaran dari proses penerapan program pengentasan kemiskinan (Saharuddin, 2009).

Pemberdayaan berbasis kearifan lokal adalah pendekatan pengembangan yang berfokus pada potensi lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pemberdayaan berbasis kearifan lokal juga dapat membantu mempertahankan dan mempromosikan budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat desa. Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan berbasis kearifan lokal, perlu adanya kolaborasi dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan

pihak swasta. Hal ini untuk memastikan agar pemberdayaan berbasis kearifan lokal di desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Seperti di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, terdapat sekitar 200 kelompok masyarakat yang beranggotakan ibu-ibu penerima bantuan sosial. Usaha pendampingan diupayakan dengan mengadakan pelatihan pemberdayaan untuk pengembangan usaha yang telah dijalankan kelompok usaha bersama. Namun karena keterbatasan anggaran, hasil kegiatan tersebut belum bisa dinikmati oleh semua anggota (Kompas, 3 Agustus 2023). Pengembangan usaha yang bersumber dari modal bersama yang disisihkan dari sebagian dana bantuan kadang terkendala ketidakmampuan keuangan para anggotanya. Dalam hal ini terkumpulnya modal sangat berpengaruh pada keberlangsungan produksi dan berkembangnya usaha bersama tersebut.

Pemberdayaan masyarakat di atas merupakan bukti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang akan berjalan secara terus-menerus, memerlukan waktu, dan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Selain itu, pemberdayaan masyarakat memerlukan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan lainnya. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan secara bertahap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mulai dari tahap persiapan, asesmen, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Agar program pemberdayaan masyarakat dapat secara berkelanjutan dilakukan, perlu dukungan sumber daya dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan lainnya.

Untuk masuk pada program pemberdayaan, masyarakat penerima bantuan sosial dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu, golongan sangat miskin, miskin, rentan, dan menengah. Pendekatan dilakukan sesuai tingkat kemiskinannya dengan beberapa program yang sudah tersedia. Dengan akurasi data yang terus diperbaharui, pemerintah dapat membagi beberapa kelompok tersebut untuk diintervensi dengan program yang tepat.

Pembaruan data bantuan sosial merupakan faktor penting keberhasilan dan ketepatsasaran program pemerintah dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Pembaruan data menjadi penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berkoordinasi terhadap penerimaan bantuan. Tidak hanya memenuhi kuota target yang belum terisi dengan calon penerima yang tidak terverifikasi kemiskinannya. Seperti yang tercatat oleh Kementerian Sosial, per tanggal 15 Mei 2023 terdapat lebih dari 64 juta data penerima bantuan sosial yang ditidurkan atau dinonaktifkan (kompas.id., 22 Mei 2023). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,5 juta di antaranya dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial karena merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), beberapa memiliki rumah yang layak dan mobil.

Penutup

Selama ini masyarakat masih bergantung pada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Namun hingga

Maret 2023, angka kemiskinan sebesar 9,36% dan masih jauh dari target nol persen pada tahun 2024. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial perlu diubah secara bertahap menjadi pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat mendorong masyarakat menjadi lebih aktif serta penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan berbasis kearifan lokal juga dapat membantu mempertahankan dan mempromosikan budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat desa.

Peran DPR RI sebagai inisiator pemberdayaan masyarakat menjadi penting karena wilayah kemiskinan berada pada tiap daerah pemilihan anggota DPR RI. Dalam hal tersebut, terdapat peluang menerapkan pilot project pemberdayaan masyarakat. Komisi VIII DPR RI juga perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap progres pemberdayaan masyarakat tersebut. Komisi VIII DPR RI juga perlu melakukan sinkronisasi program pada tiap kementerian yang memiliki program serupa dengan pemberdayaan masyarakat agar pemanfaatan anggaran pemberdayaan tercakup luas dengan komunitas yang beragam.

Referensi

- Hadiyanti, Puji. 2008. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur". *Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 17, No. 9, pp. 90-99.
- "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023", bps.go.id., 17 Juli 2023, <https://www.bps.go.id/press-release/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses 16 Agustus 2023.
- "Saatnya Gulirkan Bansos Berorientasi Pemberdayaan Masyarakat", kompas.id., 22 Mei 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/21/bansos-berorientasi-pemberdayaan-dibutuhkan>, diakses 6 Agustus 2023.
- Saharuddin. 2009. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 3, No. 1, pp. 17-44.
- "Sulit Melepas Kebiasaan Menerima Bantuan", *Kompas*, 3 Agustus 2023, hal. 19.
- "Survei Populi Center, Bansos Jadi Program Paling Penting Diteruskan Presiden Selanjutnya", kompas.com., 26 Juni 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/06/26/21533611/survei-populi-center-bansos-jadi-program-yang-paling-penting-diteruskan?lgn_method=google, diakses 6 Agustus 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.